

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan tolak ukur penelitian. Selain mengutip dan mengulang teori-teori peneliti yang sudah ada berdasarkan judul penelitian, diperlukan kajian-kajian untuk membantu memahami permasalahan yang sedang dibahas dengan pendekatan yang lebih spesifik. Penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian ini, namun topik penelitian akan dipertimbangkan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Beberapa penelitian terkait adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh tyas arma rindi pada tahun 2019 yaitu sebuah skripsi berjudul “pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata (studi kasus desa wonokarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung utara) peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh informasi melalui masyarakat. Dari metode di atas peneliti menghasilkan informasi mengenai bagaimana mengetahui potensi desa dan langkah-langkah untuk melakukan pemberdayaan desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh ana susanti pada tahun 2020, penelitian ini berjudul “pemberdayaan masyarakat melalui agrowisatabelimbing dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kelurahan karangsari kecamatan sukorejo kota blitar” penelitian

ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sumber data yang utama didapatkan dari hasil pengamatan dan wawancara. Pada penelitian ini kita bisa mengetahui bagaimana tahap pemberdayaan serta kendala dan solusi dalam pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh nisa aqilah pada tahun 2022, skripsi berjudul “pemberdayaan potensi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi di desa passeno kabupaten sidenreng rappang” penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Pada penelitian ini kita dapat mengetahui bagaimana pemberdayaan potensi desa di lokasi yang peneliti pilih serta siapa saja yang terlibat dalam program tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh bacharuddin yusuf tahun 2022, skripsi berjudul “strategi pemberdayaan masyarakat melalui implementasi program desa wisata berbasis kearifan lokal di agrowisata sirah kencong kabupaten blitar” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata yang berasal dari responden, catatan lapangan dan mempelajari dokumen. Pada penelitian ini kita bisa mengetahui bagaimana strategi dan implementasi serta apa saja faktor pendukung dan penghambat program desa wisata dilokasi penelitian tersebut.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh tika febri widyastuti pada tahun 2022 yaitu skripsi yang berjudul “pemberdayaan desa melalui pengembangan objek wisata taman limo, desa jatiwangi, kecamatan cikarang barat, kabupaten bekasi” penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, pada penelitian ini kita dapat mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di desa setempat serta bagaimana saja bentuk kegiatan yang dilakukan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang memiliki tujuan mendorong nilai-nilai pada masyarakat untuk paradigma baru dalam pembangunan menitikberatkan pada masyarakat, bersifat partisipatif, memberdayakan, serta berkelanjutan (Chamber, 1995). Menurut Kadin, konsep pembangunan menggunakan cara pemberdayaan masyarakat bukan hanya bertujuan untuk mencapai kebutuhan dasar masyarakat, melainkan juga sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat (empowerment) telah diakui menjadi salah satu strategi alternatif pembangunan yang telah dikembangkan dalam berbagai literatur dan gagasan.

Pemberdayaan adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kemandirian dan peningkatan daya tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan eksternal. Konsep pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, pemberdayaan dapat dipahami dalam konteks penetapan status masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat (beneficiaries) yang bergantung pada bantuan dari luar seperti pemerintah, tetapi juga sebagai subjek (agent atau proxy partisipan) bergerak secara mandiri. Namun, bergerak secara mandiri bukan berarti lepas tanggung jawab serta pengawasan negara.

Penyediaan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan lainnya tetap merupakan tanggung jawab negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti memiliki kebebasan dan kemampuan untuk mengembangkan potensi kreatif, menguasai lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, mandiri dalam menyelesaikan permasalahan, dan turut serta dalam proses politik di sektor publik. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan adalah kunci penting (Sutoro Eko, 2002).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan masyarakat menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pengembangan masyarakat sebagai upaya mencapai kompetensi dan kemandirian dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Tujuan pemberdayaan masyarakat

Secara umum pemberdayaan masyarakat menasar pada kelompok masyarakat yang rentan sehingga setelah dilakukan kegiatan yang berdaya mereka mempunyai kekuatan serta kemampuan dalam mencapai dan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut meliputi sandang, pangan, dan papan. Selain terpenuhi kebutuhan dasar, masyarakat diharapkan memiliki akses terhadap sumber daya produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan serta memperoleh barang dan jasa berkualitas mereka butuhkan. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhinya (Suharto, 2010).

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberdayakan kelompok yang tidak berdaya dan lemah. Rasa tidak berdaya ini bisa muncul akibat faktor internal seperti persepsi diri atau faktor eksternal seperti penindasan oleh struktur sosial yang tidak adil. Harapannya, setelah melalui proses konsolidasi, masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Kemandirian ini mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, hak berpendapat dan bersuara, serta kemampuan masyarakat dalam menentukan hak politik mereka (Hamid, 2018).

3. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

Penguatan suatu komunitas memerlukan keterlibatan beberapa elemen yang saling terkait, berbagai kemungkinan yang ada dalam masyarakat. Seperti:

- a) birokrasi pemerintah harus mampu beradaptasi dan membangun misi ini. Partisipasi dialog terbuka dengan masyarakat, peraturan dan alat regulasi menciptakan mekanisme pasar yang berpihak pada masyarakat lapisan bawah.
- b) organisasi kemasyarakatan yang berada di luar lingkungan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional dan lokal.
- c) organisasi kemasyarakatan yang muncul dari dan di dalam masyarakat itu sendiri seperti BPD (Organisasi Kemasyarakatan Lokal), PKK, Karang Taruna, dan lainnya.
- d) Koperasi sebagai wadah perekonomian nasional. Ini adalah organisasi sosial yang bersifat ekonomi dan struktur bisnis yang sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia.
- e) Dibutuhkan dukungan. Sebab, masyarakat miskin pada umumnya merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan dalam pengembangan diri.

- f) pemberdayaan harus dipandang sebagai proses bottom-up dalam proses perencanaan pembangunan nasional.
- g) keterlibatan masyarakat yang lebih kuat, khususnya dunia usaha dan sektor swasta.

4. Pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terlibatnya berbagai pihak sangat berpengaruh akan terwujudnya tujuan dari pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah:

a) **Pemerintah**

Pemerintah adalah penanggung jawab pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai peran dalam pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitator, regulator, dan pengawas. Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan, anggaran, sarana, prasarana, bantuan teknis, dan lain-lain untuk mencapai pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga dapat memantau dan mengevaluasi hasil dan dampak pemberdayaan masyarakat.

b) **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

LSM adalah organisasi non-pemerintah yang aktif di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. LSM berperan sebagai mitra dan sekutu dalam

pemberdayaan masyarakat. LSM dapat memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk advokasi, pendidikan, konsultasi, pelatihan, penelitian, peningkatan kapasitas, dan lain-lain untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemberdayaan masyarakat. LSM juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

c) Sektor Swasta

Pihak swasta adalah pihak yang melakukan usahanya tanpa bergantung pada pemerintah. Pihak swasta berperan sebagai mitra dan sponsor dalam pemberdayaan masyarakat. Pihak swasta dapat memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk dana, barang, jasa, teknologi, informasi, dan lain-lain untuk membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Sektor swasta juga dapat berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan visi dan misinya.

d) Akademik

Akademisi terlibat dalam pengajaran atau penelitian ilmiah. Para ilmuwan berperan sebagai mitra dan penasihat dalam memperkuat masyarakat. Para akademisi dapat memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk pengetahuan, teori, metode, analisis data, dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pemahaman dan solusi penguatan komunitas. Para

ilmuwan dapat melakukan penelitian dan publikasi mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat

5. Metode Pemberdayaan Masyarakat

CO (Community Organizing) dan CD (Community Development) adalah metode dalam pekerjaan sosial yang berfokus pada intervensi di tingkat komunitas, atau praktik makro. Menurut Kamus Pekerjaan Sosial, pengorganisasian komunitas (CO) adalah proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial dan profesional lainnya untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas dengan kepentingan bersama dalam wilayah geografis tertentu. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan mencapai kesejahteraan sosial melalui upaya yang terencana dan kolaboratif.

Community Development (CD), atau pengembangan komunitas, adalah proses yang melibatkan para profesional dan penduduk lokal dalam inisiatif untuk mencapai dan mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan sosial dan sumber daya kesejahteraan sosial melalui komunitas itu sendiri atau melalui bidang tertentu. Inisiatif ini dilakukan oleh warga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan berkelanjutan.

C. Desa Berdaya

1. Pengertian desa berdaya

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang didalamnya dijelaskan salah satunya mengenai pemberdayaan desa, oleh karena itu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di indonesia berdasarkan peraturan gubernur jawa timur nomor 20 tahun 2022 tentang pedoman umum program pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pemulihan ekonomi provinsi jawa timur yang dimana dijelaskan mengenai program pemberdayaan masyarakat dengan latar belakang akibat dari bencana pandemi corona yang terjadi pada tahun 2019 yang membuat terjadinya peningkatan kemiskinan di provinsi jawa timur.

Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemberdayaan masyarakat melalui program desa berdaya yang merupakan inovasi pembangunan desa. desa berdaya adalah suatu konsep pengembangan desa yang menempatkan masyarakat pedalaman sebagai pusat pembangunan dan pengambilan keputusan. Dalam desa berdaya, masyarakat dilibatkan dalam seluruh tahapan pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Desa berdaya memiliki fokus untuk memperbaiki dan memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan desa

tematik melalui ekonomi kreatif, inovatif serta produktif berbasis bum desa, dalam rangka mempertegas legalisasi status desa mandiri dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya desa untuk mewujudkan desa berdaya.

2. Nilai dan prinsip desa berdaya

Desa berdaya didasarkan pada beberapa nilai dan prinsip, diantaranya:

- a. Partisipasi masyarakat: masyarakat terlibat aktif dalam mengambil keputusan dan menjalankan program pembangunan desa.
- b. Keadilan: setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan hasil pembangunan desa.
- c. Transparansi: informasi mengenai kegiatan pembangunan desa harus dapat diakses secara transparan oleh semua pihak.
- d. Kemandirian: masyarakat didorong untuk mengembangkan potensi dan sumber daya local guna mencapai kemandirian.
- e. Kolaborasi: keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dalam pembangunan desa bersama-sama.

3. Program desa berdaya

Tujuan dari program desa dikelompokkan secara besar menjadi dua yaitu:

1. Keberdayaan komunitas: indikatornya berupa terbentuk atau menguatnya lembaga kemasyarakatan, dalam sektor ekonomi berupa badan usaha milik masyarakat (BUMMas) yang banyak sekali variasi bentuknya.
2. Keberdayaan individu: indikator berupa peningkatan pengetahuan, motivasi dan kemampuan dalam mengimplementasikan sektor tertentu baik itu berupa pendidikan, kesehatan, lingkungan atau lainnya yang berpengaruh pada kesejahteraan.

DPMD provinsi Jawa Timur melalui bidang pemberdayaan usaha ekonomi desa melalui program desa berdaya berfokus pada empat kegiatan, yaitu:

- a. Menumbuhkan inovasi produk (barang dan jasa) yang mampu menggerakkan perekonomian desa.
- b. Memunculkan produk ikon desa yang khas melalui economic branding berbasis inovasi.
- c. Mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk menguatkan ikon desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

- d. Menciptakan praktik keteladanan sehingga menjadi sumber inspirasi.

4. Indikator desa berdaya

Keberadaan desa menunjang kehidupan masyarakat secara umum, khususnya di perkotaan. Oleh karena itu, perlu dipastikan adanya kegiatan yang dapat merangsang kehidupan perekonomian desa melalui program-program yang dapat dikembangkan secara taktis dan strategis berdasarkan potensi dan sumber daya desa.

Inovasi dalam bentuk program Desa Berdaya diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian untuk sasaran atau indikator desa berdaya, yaitu:

1. Desa berdaya mempunyai status kemajuan dan kemandirian desa di tahun 2020 sebagai desa mandiri sesuai dengan keputusan direktur jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa nomor 303 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas keputusan direktur jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa nomor 30 tahun 2016 tentang status kemajuan dan kemandirian desa.
2. Desa mandiri tahun 2020 ditunjuk oleh DPMD provinsi berdasarkan 10 kriteria dari indikator IDM yang relevan dengan pengembangan desa *tematik (iconic)* dengan mempertimbangkan masukan dari DPMD kabupaten.

IDM (indicator desa membangun) adalah perangkat indikator yang dikembangkan untuk menuju desa maju dan mandiri

perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Oleh karena desa berdaya yang diterapkan oleh pemerintah provinsi jawa timur merupakan desa yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan rekomendasi dari IDM tetapi harus relevan dengan pengembangan desa *tematik*.

Setelah itu dilakukan peninjauan oleh DPMD provinsi dan DPMD kabupaten yang diman ketika sudah sesuai dengan rekomenasi IDM maka desa tersebut akan ditetapkan sebagai lokasi desa berdaya.

